BAB 2

KONFLIK DAN PELANGGARAN HAM KASHMIR SETELAH PENCABUTAN PASAL 370

2.1 Sejarah Sengketa Kashmir

Sengketa Kashmir menjadi isu abadi layaknya Israel-Palestina. Wilayah tersebut menjadi titik buntu hubungan India-Pakistan sejak kedua negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 1947. Sejak saat itu, kedua negara mengerahkan berbagai upaya untuk memiliki wilayah tersebut secara utuh dan menjadi bagian yang terintegrasi. Isu menjadi polemik yang rumit bagi dunia hubungan internasional ketika isu tersebut diangkat menjadi agenda pada sidang PBB.

2.1.1 Profil Wilayah Kashmir

Kashmir merupakan wilayah yang secara geografis sangat strategis terletak di Asia Selatan tepatnya di utara sub-benua India. Letak geografis Kashmir yang begitu strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara besar di sekelilingnya. Batas-batas Jammu-Kashmir yaitu sebelah utara yang berbatasan dengan Rusia dan China, di sebelah timur berbatasan dengan China Sinkiang dan Tibet, di sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan India (Widyawati, 2010). Kashmir memiliki tipologi lembah, dataran rendah, serta memiliki tanah yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan dan pengairan yang lancar. Kashmir memiliki potensi alam yang indah serta sumber daya yang melimpah

pula (Banday, 2016). Secara resmi, Kashmir merupakan wilayah integral India, sesuai dengan isi perjanjian aksesi pada 26 Oktober 1947 (Schofield, 2003). Wilayah yang menjadi bagian dari India dan di bawah pemerintahan federal mencakup Jammu, Ladakh, dan Kashmir.

2.1.2 Awal Mula Kashmir menjadi Wilayah Sengketa

Jauh sebelum India dikuasai oleh Inggris, dua komunitas besar yang menempati sub-benua India yakni Islam dan Hindu hidup berdampingan dengan damai, setiap permasalahan politik dapat terselesaikan dengan baik serta penegakan konstitusi melalui pengadilan yang tegas dan independen. Dalam konstitusi tersebut menjamin hak-hak bagi setiap komunitas utamanya Hindu dan Islam. Kekuasaan Inggris dianggap sebagai sebuah tindakan penindasan, hingga melahirkan gerakan di India yang menuntut kemerdekaan sebagai negara yang berdiri sendiri. Gerakan juga muncul dari Liga Muslim yang digagas oleh Mohammad Ali Jinnah serta memperkuat permintaan Dr. Mohammad Iqbal (seorang filsuf dan penyair) pada 1930 untuk membentuk negara terpisah bagi Muslim India serta mengakomodasi kepentingan orang-orang Islam untuk berdiri sendiri menjadi negara Islam di tanah yang saat ini menjadi Pakistan. Tahun 1940 menjadi salah satu momentum bersejarah, ketika Muslim India menyerukan bahwa mereka bukanlah kelompok minoritas di tengah kelompok Hindu India, melainkan mereka adalah “bangsa di dalam bangsa”. Melalui berbagai negosiasi, Liga Muslim di bawah perintah Jinnah mampu memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pakistan.

Terbentuknya Pakistan menciptakan suasana penuh dengan perselisihan dan pertengkaran antara komunitas besar di India. Komunitas Hindu tidak menginginkan terpisahnya Pakistan menjadi disintegrasi bangsa dan diperparah dengan hadirnya Inggris menyebarkan adu domba di antara keduanya. Ketika Inggris memberikan pemerintahan India kekuasaan, persaingan India dan Pakistan tampaknya akan menemui babak baru dan lebih rumit kedepannya.

Tanggal 15 Agustus 1947 menjadi hari penting ketika Inggris secara resmi menanggalkan kekuasaan di sub-benua India setelah lebih dari 200 tahun. Kekuasaan tersebut diserahkan melalui pembagian kepada India dan Pakistan hingga menjadi dua negara yang resmi berdaulat (Yousf, 2009). Pengambilalihan kekuasaan tampaknya tidak diawasi secara ketat oleh kedua negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul, salah satu permasalahan tersebut berkaitan dengan pembagian wilayah teritori yang dinilai tidak merata dan dilakukan secara tidak adil. Disintegrasi bangsa menjadi dua negara berdaulat menjadi persaingan dengan intensitas tinggi dan saling merasa tidak puas dengan berbagai hasil negosiasi antara keduanya. Hal itu diperparah dengan pemimpin sub-wilayah dengan rakyatnya yang tidak sependapat, setidaknya tiga wilayah yang cukup alot untuk menentukan pilihan bergabung dengan India atau Pakistan. Tiga wilayah tersebut adalah Junagadh yang akhirnya memilih bersama India, Hyderabad melalui pendudukan militer bergabung ke India, serta Kashmir yang memiliki mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun pemimpinnya beragama Hindu. Wilayah Kashmir yang

disengketakan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama buruknya hubungan India dan Pakistan (Mashad, 2004).

Gambar 2.1 : Peta Sengketa Kashmir

Sumber: Asian Borderlands; The Politics of Space and Belonging across the Line of Control (2019)

2.1.3 Peperangan yang Sempat Terjadi Antara India dan Pakistan

India dan Pakistan yang sebelumnya telah mendapatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Pemerintah Inggris tidak serta membuat keduanya menjadi negara tetangga yang rukun. Permasalahan-permasalahan politis dan nonpolitis

timbul akibat gesekan kepentingan antara keduanya yang tidak dapat dihindari. Akar permasalahan yang kompleks menjadi penyebab berbagai permasalahan sulit untuk diurai dan ditemukan solusi yang tepat untuk menciptakan perdamaian di kawasan Asia Selatan. Konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan beberapa kali pecah dalam peperangan. Gagalnya PBB melalui resolusinya ditandai dengan beberapa konflik kedua pihak yang mengarah ke peperangan hingga menjadi perang yang benar-benar terjadi. Beberapa konflik mengarah ke peperangan tersebut terjadi pada 1947, 1965, 1971, 1999, 2002, 2009, dan 2010 hingga tahun 2019 konflik ini kembali memanas (Rosdiana, 2020).

a. Perang Kashmir yang terjadi pada rentang 1947-1948 merupakan perang pertama yang mempertemukan kedua pihak yang bersengketa. Peperangan ini dipicu ketika Inggris memerdekakan negara jajahan dan setiap negara bagian dibolehkan untuk memilih bergabung kepada Pakistan atau India, serta diizinkan untuk mendirikan negara sendiri. Kashmir yang dipimpin oleh Maharaja Hari Singh yang seorang Hindu memilih condong kepada India, meskipun rakyat yang ia pimpin mayoritas muslim. Islamabad mengirimkan kelompok Muslim ke Srinagar, Ibu Kota Kashmir setelah gagal membujuk Maharaja Hari Singh. Pemimpin itu kemudian meminta bantuan ke militer India dengan imbalan penandatanganan perjanjian aksesi dan penyerahan Kashmir tepatnya pada 26 Oktober 1947 ke Pemerintah India (CNN, 2019). Aneksasi tersebut memicu kegelisahan penduduk Kashmir dan timbulnya demonstrasi di lembah Kashmir. Pasukan kesukuan

muslim tersebut adalah NWFP *(North-West Frontier Province)* atau sekarang KP (Khyber Pakhtunkhuwa) serta *FATA (The Federally Administered Tribal Areas)* yang saat itu bergerak ke Srinagar dengan keadaan yang lemah, hingga dapat dilumpuhkan oleh militer India dan dengan bantuan Pasukan Inggris untuk menguasai sepertiga wilayah lembah yang sebelumnya dikuasai pasukan kesukuan tersebut. Perang ini berakhir dengan ditandatangani perjanjian gencatan senjata pada 1 Januari 1949.

b. Konflik kembali muncul pada tahun 1965 tepatnya pada 5 Agustus hingga 22 September 1965, ketika resolusi dan upaya perdamaian menemui kegagalan. Pertempuran di perbatasan India dan Pakistan mengerucut menjadi peperangan tanpa deklarasi formalitas. Perang ini melibatkan puluhan ribu pasukan dari India dan Pakistan dengan saling melemparkan serangan di perbatasan internasional (Pike, India-Pakistan War 1965, 2011). Selanjutnya, penandatanganan *Tashkent Agreement* menjadi tanda berakhirnya perang tersebut sekaligus menjadi ajang pertunjukkan kedua negara dalam menampilkan kekuatan militer masing-masing.
c. Tahun 1971 perang antara India dan Pakistan kembali meletus terkait kemerdekaan Bangladesh. Sengketa Kashmir disini tidak menjadi alasan utama seperti dua perang sebelumnya atau menjadi masalah perifer belaka. Namun, Kashmir menjadi daerah yang diproteksi untuk tidak terdampak perang yang eskalasinya semakin meningkat.
d. Tahun 1999 kembali terjadi perang yang disebabkan oleh masalah Kashmir tepatnya di Kargil atau disebut juga sebagai Perang Kargil 1999. India dan

Pakistan yang memiliki kepentingan masing-masing dalam memperjuangkan wilayah Kashmir, mengerahkan personel dan unjuk kekuatan. Kargil merupakan distrik dari Kashmir, yang merupakan tempat terjadinya konflik militer ini. Perang Kargil dipicu ketika militer Pakistan melalui Angkatan Daratnya menyerang pos pengamanan milik India di Kargil sekaligus menguasai pos-pos lain milik India. Tentunya hal ini memicu reaksi dari India. Hal ini disebabkan oleh pasukan Pakistan yang masuk ke *Line of Control* milik India, karena perbatasan tersebut merupakan wilayah *de facto* kedua pihak yang bersengketa. Tampak sekali usaha Pakistan merebut Kargil sebagai bagian dari kepentingannya merebut Kashmir. Ketegangan kedua negara sudah terjadi sejak bulan Mei 1998, hingga merembet ke operasi militer yang diduga adanya keinginan untuk menginternasionalisasikan isu di Kashmir dan mendapatkan perhatian dunia internasional (Pike, 2011). Pada akhirnya, Perang Kargil berakhir karena adanya intervensi dari dunia internasional untuk mencegah perang nuklir secara penuh karena kedua negara telah uji coba bom nuklir sebelum konflik di Kargil ini meletus (Hussain, 2006).

2.2 Pencabutan Pasal 35A dan Pasal 370

Jammu dan Kashmir menjadi wilayah yang kontroversial dalam proses pembagiannya, yang mana sepertiga wilayah merupakan wilayah yang dikendalikan oleh Pakistan sedangkan untuk bagian sebanyak dua pertiganya dikendalikan oleh India. Pengelolaan India atas wilayah sebesar dua pertiga tersebut menggunakan strategi politik dengan bentuk federalisme asimetris

(Tillin, 2007). Sebagai negara bagian, Jammu dan Kashmir diberikan status khusus berupa semi-otonom oleh India. Dalam status khusus tersebut memuat beberapa ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat Kashmir dalam jangka waktu yang lama. Namun, tanggal 5 Agustus 2019 tampaknya menjadi tahun yang suram bagi Kashmir. Pada tanggal tersebut, India melalui Perdana Menterinya yakni Narendra Modi mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat kontroversial bagi dunia internasional. Kebijakan tersebut memuat ketentuan bahwa status khusus Jammu dan Kashmir resmi dicabut atas beberapa pertimbangan dari India. Status kenegaraan sebelumnya diturunkan menjadi wilayah persatuan.

Pasal 370 merupakan bagian dari Konstitusi India yang bersifat sementara, artinya bisa saja dihapus oleh Majelis Konstituante India. Setelah kemudian majelis tersebut dibubarkan dan berganti menjadi Parlemen India sementara sampai 1952. Sehingga, transformasi tersebut membuat pasal 370 mengalami ketidakjelasan sampai pada April 2018 ditetapkan secara permanen dalam Konstitusi India (Mahapatra, 2018). Selanjutnya, Pasal 35A dikeluarkan untuk memperkuat hak status khusus Kashmir melalui Inpres India pada 1954 yang kemudian diketahui sebagai Constitutional Order No. 48 (Sabha, 2017).

2.2.1 Urgensi Pasal 35A dan Pasal 370 Bagi Masyarakat Kashmir

Pasal 370 dalam konstitusi India memiliki kedudukan penting di hati penduduk Kashmir. Pasal tersebut berisi ketentuan yang memberikan Kashmir dan Jammu hak otonomi daerah. Hak otonomi ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi demografi wilayah yang memiliki ciri khas. Selain

itu, pasal 35A dan 370 memuat hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penduduk asli Kashmir yang mana disebut sebagai penduduk tetap, berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah tunjangan pekerjaan, jabatan, perlindungan keamanan dan lain sebagainya. Selain itu penduduk Kashmir dalam pasal tersebut juga diberikan hak jual beli tanah Kashmir, Jammu dan Ladakh (BBC Indonesia, 2019). Menurut Pasal 370 yang memang dikhususkan berlaku di Kashmir yang dikuasai oleh India, pemerintah pusat mempunyai yurisdiksi atas pertahanan negara, urusan eksternal dan komunikasi, dan segala sesuatu yang lain berada di bawah yurisdiksi Kashmir (Santos, 2007:70).

Terdapat enam ketentuan khusus yang tercantum dalam Pasal 370 yang mengatur status khusus Kashmir untuk melindungi hak otonomi khusus wilayah (Noorani, 2000), yakni:

1. ketentuan Jammu dan Kashmir yang memiliki konstitusi sendiri dalam persatuan India, memiliki bendera sendiri serta lagu kebangsaan
2. Kekuasaan eksekutif parlemen India atas Jammu dan Kashmir terbatas pada tiga aspek yakni pertahanan, urusan luar negeri dan komunikasi
3. Pada situasi tertentu, kewenangan federal dapat diperlukan dengan persetujuan dari pemerintah Jammu dan Kashmir
4. Persetujuan tersebut bersifat sementara, karena perlu untuk diratifikasi oleh majelis konstituante negara bagian
5. Kewenangan pemerintah negara bagian dalam memberikan persetujuan hanya berlangsung sampai terbentuknya majelis konstituante negara bagian

6. Pasal 370 memberikan wewenang kepada presiden India untuk menerbitkan perintah yang mengubah atau membatalkannya melalui rekomendasi dari majelis konstituante.

Pasal 35A berisi tentang aturan terkait definisi kewarganegaraan bagi orang-orang Kashmir, hak-hak mendasar, kepemilikan atas properti sekaligus status administrasi. Sehingga hanya penduduk Kashmir saja yang dapat tinggal, jual beli properti serta menggunakan sumber daya alam yang terdapat di Kashmir (Surbhi Gupta, 2018). Dengan dicabutnya Pasal 35A dari konstitusi India, menandakan bahwa setiap warga negara India dapat menjadi penduduk Kashmir dan dapat melakukan investasi di sana sebagai bagian dari upaya memasukkan Kashmir yang dikuasainya menjadi bagian persatuan India.

1.2.2 Dampak Pencabutan Pasal 35A dan Pasal 370 bagi Kehidupan Kashmir

Sebelum dicabut secara resmi, pelaksanaan Pasal 370 dinilai tidak dijalankan dengan baik karena pemerintah India terus menerus mencampuri urusan Kashmir dan merusak otonomi negara bagian tersebut untuk usaha mengintegrasikan Kashmir lebih dekat dengan seluruh bangsa di India (Santos, 2007). Pencabutan pasal 370 dari Konstitusi India kemudian resmi dianulir pada tanggal 5 Agustus 2019 telah menimbulkan dampak yang memilukan bagi kehidupan masyarakat Kashmir. Hari-hari menjelang pencabutan pasal tersebut, tampaknya Pemerintah India telah memberikan sinyal yang menandakan bahwa akan ada kebijakan baru yang merubah total status Kashmir dan warganya. Sehari sebelumnya, 4 Agustus 2019 India memberlakukan

kebijakan *lockdown* secara total. Jumlah tentara yang berjaga di kawasan Jammu dan Kashmir dikerahkan lebih banyak lagi, yakni sejumlah 45.000 personil. Penerjunan pasukan bersenjata itu bertujuan untuk menegakkan aturan kebijakan *lockdown* total, menutup pasar dan pusat kegiatan perekonomian, institusi pendidikan serta berbagai ruang publik untuk diberlakukan selama beberapa pekan. Untuk mendukung kebijakan *lockdown* ini, internet dan layanan telepon dimatikan, pemberlakuan jam malam, serta kegiatan yang mengarah pada pertemuan publik juga dilarang. Pasukan tersebut diterjunkan sebagai persiapan awal untuk mengumumkan kebijakan pencabutan Pasal 370 (Dutta T. , 2019).

Mirisnya, tokoh dan pejabat setempat juga ditindaklanjuti melalui penahanan preventif. Hal itu bertujuan untuk menghindari mereka mengakomodasi pergerakan yang memicu pemberontakan atau penolakan atas berlakunya kebijakan *lockdown* tersebut sebagai awal dari dikeluarkannya kebijakan anulir Pasal 370 (CNN Indonesia, 2019). Tindakan tersebut masih berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya, bahkan beberapa pejabat diusir secara paksa untuk keluar dari wilayah yang dipimpinnya. Mereka tidak diizinkan untuk memasuki negara bagian tersebut. Akibatnya, tidak ada peran dari tokoh atau pun pejabat yang menjadi wakil untuk mengadvokasi kepentingan warga Kashmir. Adapun ketentuan lain yang mengatur pejabat atau tokoh yang dibebaskan, mereka tidak boleh mengkritik Pemerintah India untuk menghindari munculnya gelombang pemberontakan.

Berbagai dampak yang timbul antara lain adalah dampak secara ekonomi, sosial serta kehidupan politik. Dampak tersebutpun berlangsung dalam waktu yang lama, dapat dikatakan hingga tulisan ini dibuat. Dampak-dampak tersebut telah menjadi bencana yang mengerikan bagi warga Kashmir karena telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan yang sebelumnya relatif tidak seburuk setelah pasal 370 dicabut.

2.2.2.1 Gejolak Pemberontakan Gerakan Kemerdekaan Kashmir

Langkah yang diambil oleh India pada bulan Agustus 2019 disinyalir menjadi indikasi tertutupnya negosiasi dengan Pakistan terkait klaim wilayah Kashmir serta membatasi Kashmir dari dunia luar setelah pencabutan pasal 370 menandakan Kashmir menjadi bagian integral dari India. Hal tersebut juga menutup akses pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendesak upaya perdamaian. Tentunya, India yang sebelumnya menyatakan bahwa Kashmir merupakan permasalahan bilateral dengan Pakistan bertransformasi menjadi permasalahan domestik, kecuali beberapa titik wilayah yang berada pada kendali Pakistan (Roche, 2019).

Pemerintah India tampak jelas mendesak masyarakat internasional maupun warga Kashmir sendiri untuk menganggap pencabutan pasal 370 menjadi masalah domestik murni, yang tentu saja memunculkan ketidakpuasaan dari kelompok separatis, dan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Kashmir selama ini. Pasca Agustus 2019, eskalasi gerakan pemberontakan semakin meningkat dan terjadi di beberapa sudut Kashmir (Jacob, 2020). Pasca pencabutan pasal 370, situasi di Kashmir semakin mencekam, ketika India

mengerahkan pasukan pengamanan tambahan dan merubah *Line of Control* (LoC) menjadi daerah dengan status siaga tinggi.

Tabel 2.1: Upaya infiltrasi teroris di Jammu&Kashmir

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Upaya Infiltrasi	222	121	371	419	328	216	99
Perkiraan infiltrasi bersih	65	33	119	136	143	138	51

Sumber: Annual Report 2020-2021, Indian Ministry of Home Affairs

Kashmir mengalami perubahan status dari negara bagian yang memiliki otonomi daerah menjadi bagian dari kesatuan India. Tentunya perubahan status ini menyebabkan terjadinya melonjaknya data pelanggaran gencatan senjata, infiltrasi teroris ke Kashmir bersumber dari Pakistan yang semakin meningkat, serta serangan teror dari gerakan separatis turut meluas. Strategi dari New Delhi dan Islamabad dalam menghadapi situasi tersebut justru dinilai membuat situasi di Kashmir semakin tidak stabil dari hari ke hari.

Indikasi lain yang dapat dilihat adalah gerakan teroris yang berkedok ingin memisahkan diri dan menginginkan Kashmir merdeka semakin meningkat dengan menyusup ke daerah Kashmir yang dikendalikan oleh India melalui seberang perbatasan Pakistan (Indian Ministry of Home Affairs, 2019).

Tabel 2.2: Tren kekerasan terorisme di Jammu dan Kashmir dalam beberapa tahun terakhir

Tahun	Insiden	Personil keamanan terbunuh	Warga sipil terbunuh	Teroris terbunuh
2014	222	47	28	110
2015	208	39	17	108
2016	322	82	15	150
2017	342	80	40	213
2018	614	91	39	257
2019	594	80	39	157
2020	244	62	37	221

Sumber: Annual Report 2020-2021, Indian Ministry of Home Affairs

Ketika kekhawatiran menyeruak di seluruh Kashmir terkait kebijakan pencabutan tersebut, India dengan mengatakan bahwa keputusan yang dilakukan melalui mobilisasi yang tinggi bertujuan untuk kontra-terorisme. Isu terorisme di Kashmir yang dikuasai India tersebut memang menjadi agenda lama dari Pemerintah India untuk segera ditangani, dan salah satu caranya adalah menjadikan Kashmir sepenuhnya dibawah kekuasaan integralnya.

Perjuangan tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil dan kelompok militant untuk pembebasan Kashmir, perjuangan juga datang dari enam partai politik di Kashmir termasuk didalamnya *the National Conference, the Congress, dan the People's Democratic Party*. Pada 22 Agustus 2020, mereka menyerukan untuk "berjuang bersama memulihkan Hak Otonomi Khusus Wilayah" (Javaid, 2020). Seruan tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Gupkar II serta mengarah kepada pembentukan Aliansi Rakyat untuk Deklarasi Gupkar. Tentu gerakan-gerakan tersebut dikoordinasikan secara sembunyi-sembunyi karena ketakutan akan ditangkap oleh militer India, disabotase oleh Pemerintah India. Namun, gerakan ini berakhir dengan cepat karena pemimpin dari partai-partai tersebut ditahan secara berkepanjangan oleh pemerintah India di tempat yang sama (Shah K. , 2020).

Sejak 2008, Kashmir yang dikuasai oleh India telah mencoba untuk mengadopsi berbagai metode nirkekerasan untuk menentang India, berbagai upaya tersebut datang dari lapisan masyarakat Kashmir yang terpelajar, pegawai negeri serta masyarakat sipil. Perjuangan ini dilakukan untuk menunjukkan perbedaan pendapat mereka dan protes terhadap pendudukan India secara illegal. Selain itu, upaya-upaya lain yang diperjuangkan melalui metode non kekerasan adalah menggelar protes, melakukan boikot serta bersikap tidak kooperatif terhadap setiap kebijakan India yang diterapkan di Kashmir yang dikuasainya. Berbagai pembangkangan, menabuh drum serta meneriakkan slogan anti-India melalui pengeras di tempat ibadah, menciptakan lagu-lagu tentang kebebasan, pawai di Lembah yang dikuasai militer India,

hingga merayakan hari kemerdekaan Pakistan, serta merayakan kemerdekaan India sebagai ‘Hari Hitam’, gerakan graffiti, serta protes budaya. Upaya-upaya nirkekerasan ini terus berlanjut hingga saat ini dan menjadi tren di sana, terutama bagi kalangan muda di sana, semua dilakukan semata-mata untuk membebaskan diri dari belenggu India (Abbas, 2019). Kalangan muda di Kashmir yang dikuasai oleh India memang dapat dikatakan memiliki keberanian yang menjadi salah satu faktor penting dalam gerakan protes terhadap pencabutan Pasal 370. Pemuda terpelajar dan mayoritas dari latar belakang ekonomi menengah ke atas bergabung dalam demonstrasi di jalanan, tentu saja partisipasi dari *kalangan* tersebut telah merevitalisasi perjuangan Kashmir dari metode non kekerasan.

1.3 Pelanggaran HAM Berat Saat Pelaksanaan dan Setelah Pencabutan Pasal 370

Konflik di wilayah Kashmir yang berlangsung sejak tahun 1947 berkaitan sangat erat dengan tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Pelanggaran HAM yang terjadi masih berlangsung hingga kini. Banyak pemimpin dan pejabat India sering menuduhkan semua kesalahan atas kekerasan di Jammu dan Kashmir kepada Pakistan disebabkan negara itu menyumbang persenjataan, pelatihan, bahkan pejuang pemberontakan (Ganguly M. , 2018).

Pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang konflik ini mencakup pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan atau pun pelecehan seksual. Tak jarang penindasan

politik dan pembatasan kebebasan berbicara masih terus berlangsung. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Abdul Salik Khan, dalam salah satu wawancara, menyatakan terdapat sekitar 900 ribu dari 8 juta penduduk Jammu dan Kashmir yang menjadi korban pelanggaran HAM dan mayoritas dilakukan oleh pasukan pengamanan dari India. Dari jumlah ini, sekitar sebanyak 10.000 kalangan muda Kashmir dipaksa masuk ke militer India (Mukhtar, 2019).

Tabel 2.3: Pelanggaran HAM di Kashmir dari Januari 1989 sampai 31 Oktober 2020

No.	Deskripsi	Jumlah Total
1.	Pembunuhan Total	95.709
2.	Pembunuhan custodian	7.150
3.	Penahanan warga sipil	161.131
4.	Bangunan dibakar/dihancurkan	110.374
5.	Wanita janda	22.922
6.	Anak yatim piatu	107.805
7.	Pemerkosaan dan penganiayaan berkelompok terhadap Wanita	11.224

Sumber: Human Rights Violations-Kashmir Media Service

Ketika menjelang hari pengumuman Pasal 370 pada 5 Agustus 2019, India telah menurunkan pasukan tambahan di Kashmir dengan memberlakukan berbagai kebijakan yang membatasi penduduk dan melanggar HAM Kashmir. Pengepungan Kashmir yang dikuasai oleh India tersebut dilakukan untuk melancarkan rencana pencabutan tersebut, dengan cara mengurung pejabat penting di Kashmir, berbagai tokoh yang memiliki peran penting dikurung guna membatasi koordinasi pemberontakan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Namun, sepanjang pelaksanaan pengepungan dan pengawasan ketat tersebut, berbagai tindakan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh militer India dengan dalih untuk kebaikan dan keamanan di wilayah Kashmir. Salah satu kelompok penekan di AS, Genocide Watch memberikan peringatan genosida di wilayah Kashmir yang diduduki India, peringatan ini meminta PBB dan komunitas internasional untuk memperingatkan India agar mengurangi eskalasi kekerasan agar tidak mengarah ke tindakan genosida seperti beberapa insiden yang pernah terjadi sebelumnya (Hussain & Mehmood, 2021).

Konflik Kashmir telah menimbulkan dampak buruk bagi psikologi penduduk khususnya anak dan wanita. Mereka selalu diliputi oleh rasa ketakutan dan khawatir yang luar biasa setiap harinya, karena lingkungan tempat tinggal mereka tidak ada jaminan atas keselamatan mereka. Kematian ribuan masyarakat tak berdosa yang menjadi korban peperangan antara India-Pakistan terus mewarnai berlangsungnya konflik ini. Berbagai tindakan kekerasan dan pembatasan HAM masyarakat Kashmir akan membentuk trauma sendiri yang berkepanjangan. Pemerintah India yang masyarakatnya mayoritas

memeluk Hindu telah bertindak memusnahkan bangsa Kashmir yang dilakukan secara sistematis melalui penculikan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, pembakaran, dan pengrusakan.

Tak berhenti sampai disitu, berdasarkan salah satu akar permasalahan awal konflik ini yakni dilatarbelakangi oleh faktor agama, hal ini berdampak pada kebebasan masyarakat di wilayah Kashmir dalam menjalankan kegiatan keagamaan sangat terbatas bahkan ditentang, karena alasan paling dasar yaitu mayoritas masyarakat Kashmir adalah Muslim. Hal ini tentu saja menjadikan ruang gerak yang terbatas untuk mengekspresikan diri mereka untuk mengadakan upacara keagamaan yang sewajarnya. Infrastruktur mereka yang merupakan fasilitas kehidupan pun turut dihancurkan, sehingga menimbulkan kehidupan masyarakat semakin tertekan. Karena perusakan dan pembatasan ini menyebabkan taraf hidup masyarakat Kashmir jauh dibawah garis kelayakan.

Ribuan penduduk terluka dan kehilangan pekerjaan setiap tahunnya, kehilangan anak-anak, saudara perempuan, ibu, dan banyak wanita harus kehilangan suaminya yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan.

Gambar 2.1: Wanita Kashmir yang kehilangan suaminya akibat diculik atau perekrutan militant secara paksa

Sumber: Ather Zia, (2020)

Ribuan rumah dan pertokoan dibakar karena situasi yang carut marut telah melumpuhkan aktivitas di dalamnya. Sejak munculnya konflik ini, ribuan penduduk Kashmir yang terbunuh di tangan tentara India terekam dalam dokumentasi oleh Amnesti Internasional tentang Hak Asasi Manusia, *US Human Right Watch Asia Physician for Human Rights, International Commission of Jurist*. India tidak hanya menolak permintaan agar menghentikan pemusnahan warga Kashmir tetapi juga menutup semua akses lembaga-lembaga tersebut untuk memasuki wilayah ini. Sebenarnya, dunia internasional cukup khawatir dengan situasi ini, konflik yang tidak kunjung berakhir dengan alasan kedua negara yang berkonflik ini sama-sama memiliki kekuatan nuklir. Konflik ini juga membatasi mobilitas kedua negara yang sedang bersaing memperebutkan wilayah ini.

Bagi penduduk Kashmir, perjuangan untuk tetap mempertahankan wilayah mereka dan tetap memproteksi hak asasi mereka, berkali-berkali mereka melakukan pemberontakan guna mendesak tentara India tidak lagi melakukan berbagai kekerasan dan tindak kejahatan yang merampas HAM masyarakat Kashmir. Pola serangan yang dilakukan oleh para militan terhadap target tertentu, pembalasan yang dilakukan oleh pemerintah, barisan dan operasi pencarian untuk mengusir para militan dan penemuan senjata serta seruan oleh para militan untuk melakukan serangan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka dengan hanya sedikit percakapan di antara mereka. Organisasi HAM dunia sudah jelas menegaskan menguntuk setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia meskipun dalam praktiknya mereka hanya memiliki akses yang terbatas. Pada tahun 1991, Asia Watch menyatakan bahwa pasukan pemerintah juga sistematis melanggar hukum hak asasi manusia internasional dengan menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran yang melakukan aksi demonstrasi damai. Kemudian Kashmir menghilang kabarnya untuk beberapa minggu bahkan beberapa bulan lalu muncul kembali ke dunia internasional ketika seorang jurnalis melaporkan suatu peristiwa yang menakutkan (Schofield, 2003).

Pelanggaran HAM yang mengorbankan masyarakat Kashmir pun tidak hanya dilakukan oleh militer India yang memang pada prinsipnya tugas pokok mereka adalah sebagai utusan negara untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kepentingan negara mereka di wilayah tersebut, tetapi terdapat pula pergerakan-pergerakan massa yang berlatar belakang berbeda-

beda seperti pergerakan politik, sosial atau pun pergerakan pemberontak dari masyarakat Kashmir sendiri. Organisasi militan yang telah beroperasi di wilayah Kashmir turut melakukan tindakan pelanggaran berat terhadap HAM internasional dan hukum humaniter. Banyak serangan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini dengan sengaja ditargetkan kepada warga sipil. Di antara pelanggaran yang terburuk yang dilakukan oleh kelompok militan ini adalah pembunuhan ratusan hingga ribuan warga sipil, termasuk anggota komunitas Hindu, pegawai negeri maupun tokoh politik, khususnya dari komunitas Muslim maupun kelompok lain yang ditentang oleh kelompok militan. Mereka juga menculik hingga mengeksekusi warga sipil baik yang Hindu maupun Muslim yang mereka tuduh sebagai informan pemerintah atau sebaliknya mendukung pemerintah India. Para warga sipil yang dicurigai sebagai informan ini kemudian diinterogasi hingga dieksekusi. Eksekusi ini dilaporkan meningkat pada tahun 1992 sebagai bentuk tindakan yang sengaja dilakukan guna pembalasan atas meningkatnya angka kematian tahanan di tangan pasukan keamanan India. Juru bicara dari organisasi militan ini telah mengakui bahwa eksekusi pasukan keamanan yang diangkat dilakukan berdasarkan kebijakan. Eksekusi ringkasan seperti itu merupakan tindakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Anggota kelompok militan juga memperkosa wanita Kashmir. Beberapa insiden pemerkosaan oleh militan tampaknya terjadi atas dasar fakta bahwa para korban atau keluarga mereka (wanita Kashmir korban pemerkosaan) dituduh sebagai informan atau telah menentang militan atau merupakan pendukung dari kelompok musuh dari

militan ini. Bahkan, beberapa anggota pasukan militan juga telah meluncurkan serangan dan melakukan tindak kekerasan terhadap wanita-wanita yang tidak mau mematuhi aturan atau kode berpakaian yang telah ditentukan atau pun pembatasan sosial lainnya. hal ini semakin memperkeruh keadaan dan menciptakan atmosfer ketakutan yang luar biasa di kalangan wanita Kashmir. Seringkali, kelompok militan ini secara brutal dan acak melukai warga sipil bahkan membunuhnya. Misalkan melemparkan granat ke dalam bus dan menggunakan granat berbahan bakar roket dengan sasaran gedung-gedung pemerintah. Sejak 1989, para anggota militan ini melakukan penculikan terhadap warga sipil kemudian menahan mereka sebagai sandera dan guna menekan musuh (saingan yang sama-sama sebagai organisasi militan). Lebih jauh dari itu, mereka menculik warga sipil untuk memeras harta dari keluarga yang diculik (Asia Watch, 1993). Setiap orang di Kashmir hidup dalam ketakutan setiap harinya. Bahkan sekolah, perguruan tinggi dan berbagai instansi pendidikan terpaksa tutup dalam jangka waktu yang yang tidak terbatas dan tidak dapat ditentukan.

Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya tak lain adalah sikap India yang benar-benar ingin menguasai semua yang ada pada Kashmir. Hal ini membuat orang Kashmir semakin teguh pendirian untuk tidak mendukung atau bergabung dengan India dan berhak untuk berusaha menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan kebebasan. Jika saja India mau melunak dan merubah sikapnya serta memberikan otonomi yang lebih besar kepada Kashmir agar dapat mengakomodasi kepentingan rakyat Kashmir. Karena secara historis

Kashmir merupakan wilayah integral dari negara India. Hak asasi manusia di Kashmir telah diinjak layaknya orang-orang di Palestina, dan dalam konteks ini pelaku utamanya adalah India. Bisa dijelaskan bahwa pelanggaran otonomi dan hak asasi manusia di Kashmir adalah indikator kegagalan demokrasi India. Setelah tahun 1989, otonomi Kashmir dicabut kemudian diubah secara bertahap dan perlahan. Pemerintah India mulai melakukan pembatasan hak-hak dasar masyarakat Kashmir (Margaret, 2019).

Konflik yang berkepanjangan dan berakibat pada pelanggaran HAM yang tak pernah usai benar-benar menciptakan suasana yang mencekam dan ketakutan dimana-mana. Konflik ini turut melumpuhkan berbagai aspek kehidupan di Kashmir, salah satunya aspek yang paling vital yaitu *health security*. Banyak program perawatan kesehatan masyarakat yang telah dimiliki sebelumnya dan telah beroperasi beberapa tahun terpaksa harus berhenti untuk beroperasi atau minimal dibatasi. Alasan utama gangguan terhadap layanan medis ini adalah bahwa akses perjalanan menjadi sangat berbahaya bagi para tenaga medis menuju tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama di daerah pedesaan. Penyergapan militan dan baku tembak antara militan dan pasukan keamanan sering sekali terjadi. Program-program kesehatan seperti imunisasi, kesehatan ibu dan anak, program keluarga berencana menjadi sangat terhambat dan berjalan sangat lambat sehingga program terpaksa ditangguhkan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan (Wani, 2013).

Masyarakat Kashmir terjebak dalam konflik bersenjata antara pasukan keamanan pemerintah India dan kelompok-kelompok militan bersenjata. Korban dari konflik ini tidak hanya orang Muslim saja melainkan orang pandit Kashmir, Sikh juga sangat menderita dengan adanya konflik ini kemudian mereka bermigrasi ke berbagai wilayah bagian di India dan terpaksa harus meninggalkan tanah air mereka, properti, budaya dan banyak hal lain. Kekhawatiran akan kehilangan salah satu anggota keluarga apabila diminta oleh pasukan keamanan atau kelompok militan dan kemudian ia tidak akan pernah kembali. Pasukan keamanan India mengklaim bahwa mereka ditugaskan untuk berjuang guna melindungi orang-orang Kashmir. Begitupun sebaliknya, kelompok militan turut mengklaim dirinya bahwa mereka berjuang untuk kemerdekaan Kashmir serta membela Muslim dari pembunuhan pasukan keamanan India. Pada faktanya, kedua belah pihak telah melakukan berbagai pelanggaran HAM berat dan pelanggaran internasional yang mengakibatkan munculnya ketakutan setiap hari, kesedihan, kekacauan, gangguan mental dan trauma berkepanjangan (Ul-Haq, 2014).

2.4 Alasan India Mencabut Pasal 370 pada 5 Agustus 2019

Pemerintah India terus bersikeras untuk mempertahankan penggunaan kekuatan yang ekstrem di dalam Kashmir sebagai bagian dari kebijakan yang mereka nilai diperlukan untuk mempertahankan wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah kekuasaan mereka, yang artinya wilayah tersebut merupakan bagian dari India yang tidak terpisahkan. Klaim tersebut menjadi dasar kuat mereka dan mereka gunakan untuk memperkuat klaim territorial mereka

diseluruh wilayah Kashmir, tidak hanya Kashmir yang dibawah pengelolaannya, namun mencakup Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan melingkupi Azad, serta tanah tak bertuan yang dikelola oleh Tiongkok. Secara keseluruhan, wilayah Kashmir memiliki luas sekitar 332.413 km^2, dinilai oleh India hanya memunculkan "perbatasan psikis" dalam imajinasi nasionalis India dalam strategi pembentukan bangsa, hal tersebut merupakan penegasan bahwa India betul-betul ingin menguasai Kashmir secara keseluruhan (Aggarwal, 2004).

Keberadaan Pasal 370 dan pelaksanaannya selama beberapa dekade itu dinilai India sebagai Pasal yang menyebabkan korupsi merajalela di wilayah Kashmir yang dikuasainya, pembangunan yang kurang, pengangguran yang terus meningkat, eskalasi aksi terorisme lintas batas serta kepemimpinan yang tidak efektif secara berturut-turut (Ahlawat & Thaakar, 2021 : 7). Sehingga, pihak India menegaskan bahwa kebijakan pencabutan pasal 370 yang dikeluarkan tersebut memiliki tujuan utama yaitu berupaya menstabilkan wilayah Kashmir yang dikuasainya. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah keinginan India yang sejak lama ingin dilakukan, yaitu mengintegrasikan wilayah Kashmir sepenuhnya menjadi bagian dari wilayah kesatuannya, bukan berstatus negara bagian lagi. Ketika kebijakan pencabutan tersebut dirumuskan di parlemen, setidaknya terdapat 351 suara yang menyatakan mendukung dan hanya 72 suara yang menyatakan untuk menentang ide kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Narendra Modi menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan dan menjadi agenda penting sebagai *titik balik*

dalam sejarah konstitusi India, serta India yakin bahwa hal tersebut akan memberikan kesempatan penduduk Kashmir untuk dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan nasional India.

India menilai bahwa kebijakan yang diambil tersebut dapat mendatangkan manfaat, yaitu membatasi para kelompok separatis pejuang kemerdekaan Kashmir serta masuknya intervensi dari pihak lain di tengah kalutnya kondisi Kashmir sebelum Pasal 370 dicabut. Faktor lain mengapa India mencabut pasal 370 pada 2019 adalah karena saat itu kondisi perekonomian Pakistan sedang rapuh dan terjerat pinjaman luar negeri, mengalami defisit dalam neraca perdagangan, serta posisi Pakistan yang sedang goyah di politik internasional, serta terdapat dendam politik India, sehingga New Delhi mengambil kebijakan tersebut untuk mendesak Pakistan dalam sengketa wilayah yang sudah berlangsung sejak lama (Bazai, 2020).

Argumen-argumen India yang mereka narasikan terkait pencabutan Pasal 370 ini mereka tegaskan sebagai upaya agar orang-orang di Kashmir menikmati hak-hak yang sama seperti warga negara India yang lainnya. Namun, klaim tersebut tidak sesuai dengan proses pencabutan Pasal 370 yang tidak melalui proses diskusi dengan penduduk setempat, India tidak berkonsultasi dengan petinggi-petinggi di Kashmir. Hari-hari menjelang pengumuman pencabutan ini pun India telah melakukan tipu muslihat kepada orang-orang Kashmir dan pencabutannya terkesan sembunyi-sembunyi dan sepihak (Medha, 2019).

2.5 Sikap Pakistan terhadap Pencabutan Pasal 35A dan 370

Pencabutan pasal 370 oleh India memicu reaksi dunia internasional, terutama Pakistan sebagai rivalnya dalam kasus sengketa wilayah ini. Pasca kebijakan tersebut diumumkan, Pakistan lantas mengusir diplomat India yang berada di Ibukota Pakistan, Islamabad. Protes keras atas pencabutan pasal 370 berupa penutupan akses perdagangan bilateral oleh Pakistan ke India. Dalam beberapa kesempatan, Pakistan mengkritik Pemerintah India khususnya kepada Narendra Modi secara terbuka. Pakistan mengatakan dengan lugas bahwa apa yang dilakukan oleh India merupakan upaya pembersihan etnis dalam skala besar. Kekecewaan Pakistan terhadap pencabutan pasal 370 diwujudkan dengan mencari dukungan dari komunitas internasional melalui kampanye diplomatik untuk mengecam India termasuk di dalamnya PBB dan OKI. Hal itu didasarkan pada Pakistan yang menganggap langkah yang diambil oleh India bertentangan dengan resolusi PBB dan akan membela Kashmir hingga titik darah penghabisan (Wasim, 2019).

Melalui pernyataan Perdana Menterinya, Imran Khan, Pakistan berupaya untuk memperoleh dukungan dari negara-negara tetangga seperti Turki, Arab Saudi, Tiongkok, hingga Malaysia untuk menegaskan pelanggaran atas resolusi DK PBB yang telah dilakukan oleh India. Menurutnya, Langkah India akan berdampak buruk pada upaya perdamaian di Kashmir serta stabilitas keamanan regional dan menjadikan Kashmir sebagai daerah yang paling termiliterisasi di dunia (Gupta, 2019). Pada pertemuan DK PBB yang terlaksana pada 16 Agustus 2019 lalu, Pakistan yang didukung oleh Tiongkok berupaya menarik perhatian

masyarakat internasional terkait isu tersebut dan dibahas dalam forum tertutup. Namun, seperti upaya-upaya sebelumnya yang sia-sia, pernyataan India menyanggah tuduhan Pakistan atas pelanggaran resolusi DK PBB serta meyakinkan dunia global bahwa isu tersebut merupakan permasalahan internal India (Mishra, 2020).